

RINGKASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD yaitu jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Dilihat dari aspek komunikasi, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan yang mana disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Kemudian dengan kemajuan IPTEK yang seharusnya menjadi dampak baik dan kemudahan bagi pegawai untuk memudahkan perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga khususnya di Bappelitbangda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan terkait SIPD. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek kepatuhan dalam pelaksanaan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disusun pada tahun 2023 menunjukkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan menunjukkan hasil “Baik”. Tetapi dalam penyusunan nya masih terdapat kekurangan yaitu server yang kurang kuat dan sumber daya manusia yang masih perlu mendapat pelatihan, tinjauan berkelanjutan dan evaluasi untuk menunjang kinerja pegawai. Pada aspek lancarnya rutinitas fungsi dan dampak yang dikehendaki sudah menunjukkan hasil yang optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SUMMARY

The Regional Government Information System abbreviated as SIPD is the management of regional development information, regional financial information, and regional government information that are interconnected to be utilized in the implementation of regional development. SIPD is a network that collects data in an integrated manner in the regions and centers using information technology, as support in regional development planning and evaluation in viewing the implementation of policies from the effective use of Bappelitbangda Purbalingga Regency. Viewed from the communication aspect, disposition aspect, and bureaucratic structure aspect. The implementation of the policy found is in accordance with the regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019. Regional planning and budgeting managed by the Bappelitbangda of Purbalingga Regency has been running in accordance with the integration of SIPD and must be used in the 2021 budget year.

The purpose of this study is to determine and analyze how the implementation, inhibiting factors, and efforts made by the Purbalingga Regency Government to the Regional Government Information System in development planning which is adjusted again with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019. Then with the advancement of science and technology which should have a good impact and convenience for employees to facilitate the development planning of Purbalingga Regency, especially in Bappelitbangda. In this study, the author uses a qualitative approach with purposive sampling techniques. The data sources used are primary data obtained through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data sources obtained from reports and journals related to the discussion related to SIPD. Validity and reliability in this study use the source triangulation technique.

The results of this study indicate that in terms of compliance in the implementation of using the Regional Government Information System of the Purbalingga Regency Government for the 2024-2026 Regional Development Plan (RPD) compiled in 2023, the report on the results of the evaluation of the government agency performance accountability system showed "Good" results. However, in its preparation there are still shortcomings, namely the server is not strong enough and human resources who still need training, continuous review and evaluation to support employee performance. In terms of the smooth functioning of routines and the desired impact, it has shown optimal results.

Keywords: *Implementation of Public Policy, Regional Government Information System*